



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anand, Ghansam, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta;
- Arikunto, Suharsimi, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Asshiddiqie, Jimly dan M. ali Safa'at, 2006 *Teori Hans kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta;
- Bertens, K. 2007, *Etika (seri filsafat Atma Jaya; 15)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok;
- Handoko, Widhi, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta;
- Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta;
- Indrajaya, Rudi, 2016, *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang*, Visimedia, Jakarta;
- Kelsen, Hans, 2006, *Diterjemahkan oleh Raisal Mutaqien, Teori hukum Murni*, Nuanasa & Nusa Media, Bandung;
- Manulang, M, 1977, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta;



- Miftah Thoha, 2005, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta;
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Murad, Rusmadi, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta;
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan hukum Kesehatan*, Rinieka, Jakarta;
- P, Siagian S., 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta;
- Parlindungan, A.P, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung;
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta;
- Rahman, Abdul S, dan Iur Adnan, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta;
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press;
- S, Salim H, 2016, *Teknik Pembuatan Akta PPAT*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Saija, Ronald dan Roger F. X. V. Letsoin, cetakan kedua 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta;
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Situmorang dan Juhir, 1998, *Aspek Pengawasan Dalam Pemerintahan*, Erlangga, Surabaya;
- Situmorang, Victor M., 1998, *Aspek Hukum Pengawasan dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta



- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Arkola offset, Jakarta;
- Sucahyowati, Hari, 2017, *Manajemen: Sebuah Pengantar*, Wilis, Malang;
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung;
- Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Mitra Wacana Media, Jakarta;
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Jurnal/ Artikel/Tesis-Desertasi**

- Adawiyah, Wiwiek R, "Studi tentang Intervensi Etika dan Peningkatan Moral Mahasiswa", *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Vol 18, No 69, Bulan Maret Tahun 2011;
- Darusman, Yoyon Mulyana, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1*, September, 2016;
- Dewi, Charina Sari, "Analisis Penerapan Etika Doentologi Terkait Ketenagakerjaan PT Trisakti Cipta Nusantara di Surabaya-Jawa Timur", *AGORA*, Vol 4, No 2 Tahun 2016;
- Ervina, Vuji, "Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol, II Edisi 2, Juli-Desember 2013;
- Sari, Bayu Nirwana, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang", *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012;



- Stevanus, Ivan, “Analisis Yuridis Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medan”, *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2016;
- Susanto, Djoko, “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Pengawasan dan Pembinaan BPN Terhadap PPAT”, Al-Ahwal, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 April Tahun 2014;
- Wawolumaya, Jeanny Elly, “Studi Perbandingan tentang Pengawasan Notaris dengan PPAT”, *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011;
- Yanto, Hari, Emrinaldi Nur DP, Lila Anggani, “Pengaruh Karakteristik Internal dan Eksternal Auditor dalam Membuat Keputusan Audit Berbasis Etika dengan Pendekatan Moral *Cognitive* Menggunakan Uji *Partial Least Square*, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, Nomor 4 Desember 2013:

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan *Burgerlijk Werboek* Stb. 1847

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3632;

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52;



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230;

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Kode Etik PPAT



#### **D. Internet**

Alfarabi, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”,  
<http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/etik-dan-kode-etik-profesi-hukum.html> diakses pada 5 Maret 2019 pukul 21:34

<http://harian.analisadaily.com/opini/news/segera-revisi-pmatrkabpn-22018/583605/2018/07/11>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> diakses pada tanggal 04 Maret 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> diakses pada tanggal 04 Maret 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 22 Maret 2019;

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pada pukul 14:47;